

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan merupakan salah satu strategi pembangunan suatu bangsa. Secara global pendidikan merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan transformasi informasi. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran minimal pada tingkat pendidikan dasar. Pendidikan adalah kunci dalam kesejahteraan dan peningkatan daya saing bangsa karena pendidikan dapat mengurangi kemiskinan.

Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan dari hasil pembangunan, sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga dapat mendorong tercapainya pembangunan manusia seutuhnya.

Menurut data dari UNESCO yang dipublikasikan oleh *Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI)*, Indonesia berada pada posisi ke-69 atau empat strip di bawah Malaysia yang berada di posisi ke-65 dari 127 negara di dunia dan jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-34.¹

Menurut study yang dilakukan oleh *Programme for International Study Assessment (PISA)* pada tahun 2012, Indonesia menempati salah satu peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan.² Peringkat tersebut dilihat dari nilai yang diraih pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika dan sains. Sejalan dengan itu salah satu ukuran mutu pendidikan di Indonesia adalah nilai ujian nasional.

Berdasarkan data dari UNESCO dan PISA, mutu pendidikan di Indonesia berada pada peringkat terendah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMP/MTs turun. Tahun lalu, nilai rata-rata ujian nasional di jenjang ini mencapai 7,47, sementara tahun ini hanya 6,1.³

¹ Bunga Citra Arum Nursyifan, *UNESCO : Pendidikan Indonesia Tertinggal dari Jiran* (<http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131122/255/188164/unesco-pendidikan-indonesia-tertinggal-dari-jiran>) diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 12.34

² Ninda Maulidya, *Rendahnya Mutu Pendidikan Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/23/rendahnya-mutu-pendidikan-indonesia-682247.html>) diakses pada tanggal 15 September 2014 pukul 10.15

³ Riana Afifah, *Nilai Rata-rata UN SMP Turun, Cuma 6,1, 2013*, (<http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/31/16284047/Nilai.Ratarata.UN.SMP.Turun..Cuma.6.1>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 09.53

Tabel I.1**Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama**

Tahun	Nilai UN
2009	7,36
2010	7,21
2011	7,33
2012	7,48
2013	6,10

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai ujian nasional mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 rata-rata nilai Ujian Nasional mengalami penurunan 0,15. Rata-rata nilai Ujian Nasional pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan. Penurunan rata-rata nilai Ujian Nasional tertinggi berada di tahun 2013 yaitu 1,38 dari tahun 2012 rata-rata nilai Ujian Nasional 7,48 menurun menjadi 6,10.

Kurangnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: profesional guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah dan biaya pendidikan.⁴

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu: faktor kurikulum, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang profesional, sumberdaya manusia profesional.⁵

Ukuran penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak terlepas dari delapan standar nasional pendidikan oleh BSNP yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP No.19/2005. Terdapat delapan SNP antara lain:

⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta : Erlangga, 2006), p.193

⁵ Abdul hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 3

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian⁶

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia, mulai dari kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, dan pembaharuan kurikulum di tahun 2004 (KBK) tidak dapat membuat Indonesia dengan hasil yang baik.⁷ Pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang di dalamnya terdapat pembelajaran materi muatan lokal dan materi pengembangan diri tidak mencerminkan hasil proses yang diharapkan

Tingginya biaya pendidikan ini adalah masalah utama di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tingginya biaya pendidikan mencerminkan mutu pendidikan tersebut, biaya pendidikan dari jenjang pra-sekolah sampai dengan jenjang perkuliahan masih tergolong tinggi. Jika melihat kondisi ekonomi sekarang, banyak anak sekolah yang putus sekolah dan tidak dapat menikmati pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 203.721 anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan.

⁶ http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61 13 September 2014 pukul 20.21

⁷ Aam Amaliyanti, *Perubahan Kurikulum* (<http://megasiana.com/pedulipendidikan/perubahan-kurikulum/>) diakses pada tanggal 23 september 2014 pukul 11.34

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.” Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta daerah (APBN/APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini lebih dijelaskan dalam GBHN tahun 1999-2004 yang mengamanatkan untuk:

“Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang berarti.”⁸

Sebagaimana tujuan pendidikan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁹

Tingginya biaya pendidikan tidak hanya pada jenjang perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan pada jenjang sekolah dasar sampai pada jenjang sekolah menengah atas. Walaupun pada saat ini sekolah sudah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih kurang untuk memenuhi biaya

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *GBHN 1999-2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), p. 27

⁹ Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun 2003 (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu2003.pdf>) diakses pada tanggal 15 September 2014 pukul 11.45

pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan program BOS dari pemerintah tidak berjalan dengan baik dan masih terdapat sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa.¹⁰ Dengan adanya dana BOS, tetapi siswa masih harus membeli berbagai buku dan keperluan tambahan untuk sekolah. Selain itu, terkadang siswa masih harus mengeluarkan uang untuk mengikuti les, dan lain-lain. Menurut Susenas MSBP 2012, rata-rata total biaya pendidikan Sekolah Menengah Pertama per siswa selama Januari – Juni adalah sebesar Rp 1.533.610.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, banyak sekolah menengah pertama bermunculan yang melakukan berbagai penawaran untuk menarik perhatian para orang tua. Ada sekolah yang menawarkan biaya pendidikan yang terjangkau bahkan sampai dengan menggratiskan uang pangkal sekolah. Adapula sekolah yang lebih mengutamakan kualitas pendidikan baik intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, meskipun dengan pembelajaran yang relatif mahal dibandingkan dengan sekolah lainnya. Sehingga membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan.

Biaya yang dikeluarkan untuk masuk jenjang pendidikan TK dan SDN saat ini dibutuhkan biaya dari Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada lembaga pendidikan yang mengharuskan membayar di atas Rp 1.000.000. Biaya yang dikeluarkan untuk masuk jenjang pendidikan SMP membutuhkan biaya dari Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000.¹¹

¹⁰ Saroh Ganik Haryati, *Loc. Cit.*

¹¹ Widarso Pujianto Ep, *Mahalnya Biaya Pendidikan, Akibat Tidak Konsisten* (<http://edukasi.kompasiana.com/2013/08/22/mahalnya-biaya-pendidikan-akibat-tidak-konsisten-582973.html>) diakses pada tanggal 14 oktober 2014 pukul 10.18

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Sementara, guru profesional kini menjadi perhatian masyarakat seiring dengan tuntutan pendidikan yang bermutu. Profesional guru dapat dilakukan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Menurut PerMendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu: guru SD/MI harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, guru pada SMP/MTs/ sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Berdasarkan data dari Kemdikbud dalam buku Teguh Pramono, pada tahun ajaran 2011/2012, masih terdapat guru yang kurang memenuhi kualifikasi akademik pada jenjang SMP, dari 100 orang guru rata-rata 15 guru yang kurang berpendidikan setingkat Diploma IV atau S1.¹²

Pemerintah memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dengan sertifikasi. Ujian sertifikasi atau Uji Kompetensi Guru (UKG) bertujuan untuk menentukan kelayakan seorang guru. Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan pada tahun 2012 membuat dunia pendidikan semakin menjadi perhatian. Dari

¹² Teguh Pramono, *Statistik Pendidikan 2012 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional* (Jakarta: badan pusat statistik, 2013), p. 29

285.000 guru yang mengikuti kompetensi, ternyata 42,25% berada di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.¹³

Selain itu, rendahnya mutu pendidikan disebabkan karena tidak meratanya fasilitas pendidikan yang layak. Fasilitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok Indonesia sangat tidak memadai. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap pendidikan menjadi penyebab rendahnya kualitas fasilitas. Banyak bangunan sekolah di Indonesia yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, serta laboratorium yang tidak memenuhi standar, pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.¹⁴

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012/2013 ruang kelas SMP yang rusak mencapai 67.582 dari total 256.754 ruang kelas, dari 48.965 SMP terdapat 26.825 laboratorium dan 22.413 perpustakaan.

Administrasi fasilitas pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar-mengajar, demikian pula administrasi yang kurang baik akan mengurangi fungsi alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya baik. Namun

¹³ Srie, *Hasil UKA dan UKG, Kompetensi Guru Lebih Buruk Dari Laporan Aljazeera?* (<http://www.srie.org/2013/02/hasil-uka-dan-ukg-kompetensi-guru-lebih.html>) diakses pada tanggal 13 oktober 2014 pukul 11.34

¹⁴ Sarah Ganik Haryati, *Wajah Buruk Pendidikan di Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/21/wajah-buruk-pendidikan-di-indonesia-518560.html>) diakses pada tanggal 15 September 2014 pukul 11.25

yang lebih penting adalah penyediaan fasilitas di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan (sekolah) di Indonesia tentu tidak lepas dari peran dan kepemimpinan seorang kepala sekolah sebagai top leadernya. Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah, maka usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi bukanlah pekerjaan mudah bagi kepala sekolah karena kegiatan berlangsung dalam sebuah proses panjang yang direncanakan dan diprogram secara baik pula. Namun pada kenyataannya tidak sedikit kepala sekolah yang hanya berperan sebagai pimpinan formalitas dalam sebuah sistem yakni hanya sekedar sebagai pemegang jabatan struktural sambil menunggu masa purna tugas, jika tidak dapat menyebut sebagai orang-orang apatis yang kehabisan energi dan gairah hidup.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.

Namun kenyataan dilapangan masih banyak kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan ini disebabkan karena dalam proses pengangkatannya tidak ada transparansi, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat serta kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat serta

banyak faktor penghambat lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mengimplikasikan rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu (input, proses, dan output).¹⁵

Beberapa survei akademis disebutkan sekitar 70 persen mutu pendidikan itu didongkrak kepala sekolah, dan sisanya oleh guru, orang tua dan peserta didik khususnya.¹⁶ Ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, dimana kepala sekolah sebagai penentu mutu pendidikan yang dihasilkan sekolah, yakni penghasil sumber daya yang diharapkan dapat bersaing di pasar global.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti membatasi masalah pada “Pengaruh Biaya Pendidikan dan Profesional Guru Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa rendahnya mutu pendidikan, juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kurikulum terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?

¹⁵ Sri Damayanti, Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah (<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/07/18/profesionalisme-kepemimpinan-kepala-sekolah/>) diakses pada tanggal 15 januari 2015 pukul 10.18

¹⁶ Ade Marboen, 70 persen mutu pendidikan ditentukan kepala sekolah (<http://www.antaraneews.com/berita/336501/70-persen-mutu-pendidikan-ditentukan-kepala-sekolah>), diakses pada tanggal 15 januari 2015 pukul 10.18

3. Apakah terdapat pengaruh profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia tahun?
6. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan dan profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka diketahui masalah mutu pendidikan demikian luas dan kompleks karena masalah itu mengandung aspek, dimensi dan faktor-faktor yang cukup banyak dan rumit. Mengingat keterbatasan peneliti terutama dari segi biaya, waktu dan tenaga maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia.
2. Pengaruh profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia.
3. Pengaruh biaya pendidikan dan profesional guru terhadap mutu pendidikan sekolah menengah pertama di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan dan profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang biaya pendidikan, profesional guru, dan mutu pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan mutu pendidikan, biaya pendidikan, maupun profesional guru.